

IMPLEMENTASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SMPN 2 TAYAN HULU KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU

Parlindungan Hutapea

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura.Pontianak.2013, Email:sibolis_naburjui@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini ditulis karena peneliti membaca dan mencermati adanya beberapa fenomena – fenomena mengenai tenaga pendidik yang belum sesuai standar nasional pendidikan yang menjadi krusial dan sulit dipecahkan oleh karena itu peneliti perlu untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai permasalahan pelaksanaan Implementasi standar pendidik dan tenaga pendidikan di SMPN 2 Tayan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif yakni metode yang berupa mencari dan menjejaki fakta, informasi dan kebenaran atas suatu permasalahan serta menggambarkan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan fakta, data dan informasi yang sesungguhnya. Adapun hasil penelitian ini lebih melihat kepada faktor komunikasi, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten kepada SMPN 2 Tayan Hulusebagai ujung tombak dari Implementasi kebijakan. Di dalam penelitian ini peneliti menemukan kurangnya informasi kembali yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau kepada Tenaga Pendidik yang baru. Disamping itu adanya tenaga pendidik yang memiliki pekerjaan tambahan seperti mengurus kebun dan ternaknya menjadikan tenaga pendidik tersebut lebih memilih hal tersebut dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMPN 2 Tayan Hulu hendaknya mampu berjalan dengan efektif apabila dilakukan sosialisasi kembali yang optimal kepada tenaga pendidik yang baru .

Kata kunci : Standar Nasional Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

Abstract

This article is written for researchers to read and observe the presence of some phenomenon of personnel educator who have appropriate national standards that are crucial and difficult to solving, because that the researchers need to provide an overview and understanding of the problems of implementation of the standard implementation of educators and education personnel in SMP 2 Tayan Hulu. This research uses the qualitative methods with descriptive analysis that is a method which in the form of searching and trailing the facts, information and truth of a problem also describe and a phenomenon that happened based on fact, data and the real information. The results of the research that more looking for the factor of communication, Disposition and Bureaucratic Structure which done of the District Education Office SMP 2 to Tayan Hulu as a spearheads of policy implementation. In this research, researcher find shortage information which given the District Education Sanggau Regency to the new educator. Besides this, presence the educators who have additional work such as taking care of the garden and their livestock make educators more choose that case prefer than to continue their study to ladder S1. The Implementation Standards Teachers and Education Personnel in SMP 2 Tayan Hulu should be able to work effectively if done again optimal socialization to new educators.

Keywords: National Education Standards, Educators and Personnel Educators.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang penting dilaksanakan di setiap sekolah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat dilaksanakannya interaksi belajar mengajar, berbagai komponen pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan baik secara umum maupun setiap bidang studi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dasar dari program tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pusat No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Pusat No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah Standar kualifikasi pendidikan di seluruh Indonesia. Sejalan diberlakukannya peraturan tersebut setiap sekolah (SD, SMP, SMA / SMK) di setiap daerah seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan peraturan tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Adapun peraturan Pemerintah Pusat No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada SMP / MTS pada bab VI pasal 28 pada bagian Standar Pendidik memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- b. Latarbelakang pendidikan tinggi dibidang pendidikan SMP / MTS, kependidikan lain, atau psikologi, dan
- c. Sertifikasi profesi guru untuk SMP / MTS.

Standar pendidik adalah kriteria pendidikan adalah prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga Kependidikan adalah Kepala Satuan Pendidik. Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur dan mediator Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah, Rektor, Direktur dan lain sebagainya.

Adapun peraturan Pemerintah Pusat No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada SMP / MTS pada bab VI pasal 35 pada bagian Tenaga Kependidikan memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/MAK;
- b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
- d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Keberhasilan implementasi standar pendidik dalam peraturan pemerintah pusat no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan sasaran, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memeriksa dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Keberhasilan Implementasi dari suatu kebijakan Standar Nasional Pendidikan tersebut tergantung pada tingkat kinerja implementor kebijakan, yang mana dalam hal ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu.

Apabila program kebijakan pemerintah yang telah disusun tidak di Implementasikan

dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kebijakan program pemerintah tidak akan sampai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Proses Implementasi Peraturan Pemerintah bukan hanya satu lembaga yang mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah melainkan bisa antar lembaga atau organisasi. Aktivitas organisasi tersebut mengupayakan untuk menetapkan dan menata kembali sumberdaya unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya (merealisasikan upaya menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sasaran kebijakan. Selain itu organisasi tersebut menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan serta penjelasan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Pada kenyataannya proses Implementasi peraturan pemerintah yang sering dipahami keliru oleh para implementor kebijakan berdampak pada kurang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari sasaran kebijakan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu adalah salah satu sekolah yang dimana tenaga pendidiknya harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan agar kualitas pendidikan di sekolah tersebut dapat meningkat dengan baik. Sehingga kualitas siswa atau siswi lulusan sekolah tersebut dapat menjadi lulusan yang bisa membawa perubahan bagi bangsa dan Negara. Begitupula dengan sebaliknya, apabila dinas pendidikan daerah kurang mengimplementasikan peraturan pemerintah dengan baik di sekolah tersebut dapat dilihat dengan dampak yang terjadi dari kualitas pendidikan maupun kualitas lulusan sekolah tersebut pada siswa atau siswi akan tidak baik.

Dalam proses implementasi standar pendidik pada SMPN 2 Tayan Hulu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau perlu menetapkan dan menata kembali sumberdaya ataupun metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 tayan Hulu identifikasi permasalahannya adalah:

1. masih ditemukan ketidaksesuaian antar disiplin ilmu tenaga pendidik dengan bidang study yang diajarkan.

2. masih ada tenaga pendidik yang belum menamatkan pendidikan S1 namun telah difungsikan sebagai tenaga pendidik.

Fenomena ini yang membuat peneliti serius lebih dalam lagi meneliti kebijakan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan lebih khusus lagi mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Standar Pendidik (Peraturan Pemerintah Pusat No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu.

Fokus Penelitian : Proses Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. Rumusan Penelitian : Bagaimana Proses Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau? Tujuan Penelitian: untuk mengungkapkan pelaksanaan Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan kebijakan Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan serta hambatan-hambatan didalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

B. LITERATUR.

Ada beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli, salah satunya model yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005:90). Dalam pandangan Edward III Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat berperan penting terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang buruk akan berdampak pada

ketimpangan-ketipangan didalam pengaplikasian suatu kebijakan. Walaupun kebijakan yang dibuat sudah jelas, tetapi apabila tidak ada konsistensi dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan dari kebijakan itupun akan bisa berjalan secara maksimal pula.

b. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal diatas kertas.

Menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino : 151) variabel atau faktor kedua dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah satunya disebagikan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak berkompeten dibidangnya. Penambahan jumlah implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (komponen dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:

Pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh dengan hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan . kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas ; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staff yang mencukupi, menerti apa yang harus dilakukannya,

dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksana suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan publik ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Intensif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi intensif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cra menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Standar operasional prosedur (SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur yang rumit

dan kompleks. Ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi / organisasi kearah yang lebih baik adalah: Melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan / administrator atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktifitas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit.

C. METODE PENELITIAN

Dalam usaha mendeskripsikan implementasi Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan (Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kabupaten Sanggau hasil penelitian ini maka peneliti menggunakan penelitian deskriptif.

Menurut Whitney (Nazir, 1988:63-64) bahwa : penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan , sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dalam pengaruh dari suatu fenomena.

Berdasarkan hasil pengamatan yang ada dilatar belakang penelitian bahwa Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi dalam implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) dalam implementasi dilapangan, masih belum sesuai Standar Nasional Pendidikan, oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Meolong (2009:6) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll.

D. HASIL PEMBAHASAN.

1. Komunikasi dalam Implementasi peraturan pemerintah no 19. Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Salah satu yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses informasi komunikator kepada komunikan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi kendala dalam implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Bapak Drs. Jais beliau mengatakan bahwa komunikasi selama ini sudah berjalan dengan baik antara Dinas Pendidikan terhadap Seluruh Sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau atau Khususnya SMPN 2 Tayan Hulu. Beliau mengatakan sudah seluruh sekolah telah disosialisasikan mengenai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dengan secara tulisan atau informasi dengan bentuk berupa surat. Namun beliau mengakui juga bahwa masih sangat banyak tenaga pendidikan yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Beliau menegaskan hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan terus memberikan motivasi kepada tenaga pendidik yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada tenaga pendidik yang sedang melanjutkan pendidikan dengan syarat Indeks Prestasi Kumulatif diatas 2. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau bekerja sama dengan pihak Universitas Terbuka dalam menyelenggarakan perkuliahan.

Setelah mendapat keterangan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, peneliti mengkonfirmasi pernyataan tersebut dengan mewawancarai pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wakil kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu yaitu bapak Bergiat Ginting mengatakan bahwa pihak Dinas pendidikan kabupaten Sanggau pernah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah melalui surat pemberitahuan. Namun beliau juga mengakui bahwa seluruh tenaga pendidik yang di SMPN 2 Tayan Hulu masih ada yang belum mendapatkan informasi mengenai peraturan pemerintah tersebut dikarenakan ketika pihak Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi ada beberapa tenaga pendidik tidak berada di sekolah. Sementara surat edaran pemberitahuan Peraturan Pemerintah no 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan hanya sekali di sosialisasikan. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Sardi selaku tenaga pendidik di SMPN 2 Tayan Hulu, beliau mengatakan ada beberapa tenaga pendidik yang belum mengetahui mengenai peraturan pemerintah no 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan dilingkungan SMPN 2 Tayan Hulu dikarenakan belum mendapat sosialisasi. Beliau membenarkan tenaga pendidik yang belum mendapatkan sosialisasi tersebut dikarenakan ketika itu sedang berada diluar lingkungan sekolah. Sehingga tenaga pendidik tersebut belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Sedangkan Kepala Sekolah tidak pernah melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Frans Daromes dan Anuar Ismus selaku tenaga pendidik yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan di SMPN 2 Tayan Hulu membenarkan pernyataan tersebut. Kepala sekolah belum pernah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada dirinya, beliau juga mengatakan belum mengetahui secara keseluruhan mengenai peraturan pemerintah no 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peneliti juga mewawancarai Tenaga pendidik yang pernah mendapatkan sosialisasi dan mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut namun belum menamatkan pendidikan S1 yakni Bapak Bergiat Ginting, beliau yang saat ini belum menamatkan pendidikannya S1 disibukkan dengan pekerjaan diluar Sekolah, yakni berkebun sehingga kurang memiliki waktu dalam mengurus perkuliahan ke jenjang S1, hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Sardi Ginting, beliau mengatakan Usia yang ada pada dirinya sudah cukup tua sehingga tenaga untuk berfikir sudah mulai lemah sementara beliau juga mengatakan disibukkan dengan pekerjaan di luar sekolah seperti berkebun dan mengurus ternaknya.

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu dalam hal ini harus sesegera mungkin melakukan upaya menanggulangi permasalahan ini dengan memberikan informasi kembali kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di SMPN 2 Tayan Hulu mengenai Peraturan Pemerintah tersebut agar tenaga pendidik lebih mengetahui dan mengindahkan Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Disposisi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman arah respon kebijakan, intensitas kebijakan. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya. Pemahaman disposisi juga merupakan suatu kecenderungan, keinginan, kemauan para pelaksana kebijakan mau melaksanakan kebijakan. Disposisi dari para pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan kebijakan yang mereka terima.

SMPN 2 Tayan Hulu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menerima suatu kebijakan dari pemerintah. SMPN 2 Tayan Hulu memiliki 14 tenaga pendidik. Dari 14 Tenaga Pendidik, tujuh diantaranya belum sesuai dengan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tenaga pendidik yang ada di SMPN 2 Tayan Hulu yang belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yakni Bapak Bergiat Ginting beliau yang saat ini belum menamatkan pendidikannya S1 disibukkan dengan pekerjaan diluar Sekolah, yakni berkebun sehingga kurang memiliki waktu dalam mengurus perkuliahan ke jenjang S1, hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Sardi, beliau mengatakan Usia yang ada pada dirinya sudah cukup tua sehingga tenaga untuk berfikir sudah mulai lemah sementara beliau juga mengatakan disibukkan dengan pekerjaan di luar sekolah seperti berkebun dan mengurus ternaknya.

Peneliti juga mewawancarai tenaga pendidik lainnya yaitu Bapak Frans Daromes, beliau saat ini merupakan guru tidak tetap di SMPN 2 Tayan Hulu yang sebelumnya kurang mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ketika peneliti menanyakan beliau untuk melanjutkan pendidikan S1, beliau mengatakan apabila dalam waktu dekat ini untuk melanjutkan S1 beliau belum siap, masih banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan dahulu, namun untuk beberapa tahun kedepan tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan S1. Peneliti juga mewawancarai bapak Anuar Ismus, beliau saat ini juga merupakan guru tidak tetap di SMPN 2 Tayan Hulu yang mulai mengajar dari awal tahun 2004, ketika peneliti menanyakan yang menjadi kendala untuk melanjutkan pendidikan S1, beliau mengatakan saat ini belum siap untuk melanjutkan pendidikannya karena belum ada motivasi pribadi secara pasti. Namun beliau juga mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya melanjutkan pendidikan S1 apabila kondisi memungkinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka kondisi dan motivasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kondisi dan motivasi tersebut menjadi salah satu kendala tenaga pendidik untuk

menjalankan peraturan pemerintah tersebut. Sebagai tenaga pendidik yang baik, tenaga pendidik yang mengerti maksud dan tujuan ditetapkan peraturan tersebut oleh pemerintah sebaiknya memiliki komitmen organisasi dari pada komitmen yang bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan SMPN 2 Tayan Hulu, mampu berfungsi dalam tata cara penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan, sehingga Peraturan Pemerintah ini terwujud dengan baik.

3. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah no 19. Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Efektif dan tidak efektifnya implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan harapan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures atau SOP). Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Para implementor kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumberdaya yang cukup untuk melakukannya, namun mereka mungkin masih dicegah dalam implementasi oleh struktur organisasi dimana mereka layani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai respon-respon internal pada waktu dan sumber informasi terbatas dan keinginan atas keseragaman didalam operasi organisasi kompleks dan organisasi yang tersebar secara luas, mereka seringkali tetap efektif disebabkan oleh kurangnya aktifitas birokrasi. Yang terakhir pada dasarnya terjadi dari tekanan diluar unit birokrasi sebagai komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara bagian dan karakter kota dan sifat dari kebijakan luas mempengaruhi birokrasi organisasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pejabat Dinas Pendidikan kabupaten Sanggau yaitu, Bapak Drs. Jais yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, beliau mengatakan struktur birokrasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan. Beliau juga mengatakan dalam proses implementasi peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sangat mengandalkan kerjasama peran UPT (Unit Pelaksana Teknis) yaitu sekolah itu sendiri. Berdasarkan wawancara terhadap Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau yaitu bapak. Drs Jais, diperoleh data mengenai struktur birokrasi, dapat diketahui struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau yang menangani bagian tenaga pendidik pada tingkat SMP adalah Bapak Drs. Dedet sebagai Kabag SMP, SMA, SMK. Beliau mengatakan Kepala Dinas sudah berkoordinasi dengan Kepala Seksi tenaga pendidik dibagian jajarannya.

Setelah mendapat keterangan dari Bapak Drs. Jais yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, peneliti mengkonfirmasi pernyataan tersebut dengan mewawancarai Bapak Drs. Dedet beliau yang saat ini menjabat sebagai Kabag SMP, SMA, dan SMK mengatakan sering melakukan koordinasi dengan dengan Bapak Drs. Yohanes Ontot, M.Si yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau. Beliau juga mengatakan pola-pola hubungan yang terjadi birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu langsung mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Sekolah itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2, Halaman 44.

Menurut peneliti, sejauh ini Pemerintah sudah berupaya meletakkan dasar-dasar bagaimana akar masalah kualitas pendidikan dapat ditangani. Masalah ini terfokus dalam tataran ditingkat operasional, sudah terpatri dalam tubuh birokrasi. Peneliti melihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya implementasi peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada SMPN 2 Tayan Hulu adalah lemahnya pengawasan pihak implementor. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu tenaga

pendidik di SMPN 2 Tayan Hulu yang juga merupakan Wakil Kepala Sekolah yaitu, Bapak Bergiat Ginting memaparkan bahwa selama ini tidak ada pengawasan yang intensif yang dilakukan untuk memantau dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMPN 2 Tayan Hulu, selama ini pemerintah hanya memantau secara umum melihat tenaga kependidikan yang ada di SMPN 2 Tayan Hulu. Hal ini mendedikasikan bahwa sampai saat ini pemerintah belum maksimal menjalankan tugasnya. Pihak yang semestinya bertanggung jawab atau memiliki kewenangan dibidang pengawasan dibidang pengawasan dalam hal tenaga kependidikan tidak mampu melakukan monitoring terhadap Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tayan Hulu.

Pentingnya pengawasan memang suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, formulasi yang selama ini dibuat secara sempurna dari segi aturan pun tidak mampu menjamin bahwa kebijakan itu akan selaras dengan tujuan yang melatar belakangnya. Bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan, apabila tidak dilaksanakan maka hasilnya akan sia-sia, dalam posisi inilah diperlukan suatu pengawasan oleh pihak yang berkompeten untuk melakukan pengawasan tersebut. Setiap kebijakan dalam tataran implementasi sudah pasti berhadapan dengan kendala-kendala teknis maupun nonteknis yang selalu mengganggu jalannya implementasi tersebut, baik kendala yang sudah diprediksi maupun yang bersifat tiba-tiba. Kesemuanya itu tentu memerlukan jalan keluar yang solutif agar implementasi kebijakan tetap dapat berjalan dengan lancar. Untuk itulah diperlukan adanya pengawasan terhadap jalannya kebijakan tersebut. Disisi lain peneliti dapat memahami bahwa melakukan monitoring terhadap sejumlah instansi terkait yang menjadi jejaring dalam Implementasi Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada SMPN 2 Tayan Hulu memang bukan merupakan hal yang mudah, diperlukan kesungguhan dan komitmen dari aparatur yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan berkala.

E. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil temuan dilapangan yang telah dianalisa secara multidipliner untuk memproyeksikan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pada SMPN 2 Tayan Hulu. Melalui metode jenis penelitian kualitatif ini, peneliti berkeyakinan dapat menggambarkan dan menjelaskan setiap unsur yang terdapat pada penelitian ini nantinya akan menjadi sumbangsih akademis dalam merekomendasikan sebuah

perbaikan dalam pola implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan secara efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Implementasi peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional pendidikan dari hasil temuan peneliti media wawancara, dapat di konklusikan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kembali Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sehingga tenaga pendidik di SMPN 2 Tayan Hulu yang belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengetahui adanya Peraturan tersebut, serta pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik yang tidak memantau secara instens.

2. Kondisi dan motivasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Kondisi dan motivasi tersebut menjadi salah satu kendala tenaga pendidik untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implemetasi kebijakan publik. Dari bagian ini peneliti melihat SMPN 2 Tayan Hulu sebaiknya menjalankan dengan sebagai mana mestinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut walaupun hasil wawancara dengan tenaga pendidik yang belum sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan tersebut mengatakan cukup sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan usia yang cukup tua dan adanya kesibukan lain diluar pekerjaannya sebagai tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum di Implementasikan dengan baik.

3. Struktur birokrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut, Standar Operasi Prosedur (Standar Operating Procedures atau SOP) yang sudah jelas dan terapkan dengan detil program bagian Kabag SMP/SMA/SMK sehingga SOP yang merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak berlaku sesuai fungsinya. Namun kinerja pengawasan belum berjalan dengan baik dan hal ini yang menimbulkan red-tape dan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar. Teguh yuwono. 2003. Kebijakan publik: Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Humaidi, S.U. 1993. Mengenal Ilmu Kebijakan Publik. Pasuruan: Garoeda Buana indah.
- Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Remaja Rosada Karya
- Putra, Fadillah. 2003. Paradigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Subarsono, A. G. 2005, Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogya: Pustaka pelajar
- Wahab, Abdul Solikhin. 2002. Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses, Jakarta : PT. Buku Kita
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Pusat No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Parlindungan Hutapea
NIM / Periode lulus : ED1109056 / 2012 / 2013
Fakultas/Jurusan : Ilmu sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : sibolis_naburju1@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....^{Publika} *) pada Program Studi.....^{Ilmu Administrasi Negara} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pada Smpn 2 Tayan Hulu Kecamatan tayan Hulu
Kabupaten Sanggau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Publika.....

NIP. 19670727 2005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 8 Mei 2013

(Parlindungan Hutapea)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).